BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya agar dapat menjadi negara maju yang mampu menyejahterakan warganya (Nurcholis, 2014). Tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah untuk menjamin kemakmuran setiap warga negara. Indonesia sebagai negara berkembang dengan kondisi ekonomi yang semakin membaik, menghadapi berbagai permasalahan yang cukup signifikan yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra. Masalah pengangguran adalah salah satu masalah yang harus dihadapi oleh negaranegara berkembang (Nugraha, 2017)

Pengangguran telah membuat banyak negara mengalami ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penanganannya sangat kompleks, sehingga banyak negara yang sulit keluar dari kemiskinan. Oleh sebab itu pengangguran perlu segera diatasi karena dapat menganggu sosial dan politik (Soekapdjo, 2021). Apabila tingkat pengangguran tinggi maka, jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan akan meningkat, beban sosial semakin berat, distribusi pendapatan tidak merata, maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat dikatakan berhasil (Mahroji, 2019).

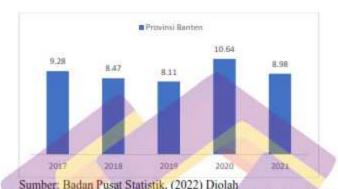
Jumlah penduduk yang tinggi jika tidak dimanfaatkan dengan maksimal dapat menimbulkan suatu masalah bagi suatu daerah. Sama halnya dengan pengelolaan kependudukan terkait dibidang ketenagakerjaan. Angkatan kerja dapat dimanfaatkan dalam penciptaan lapangann kerja melalui investasi swasta atau asing dan pemerintah (Marliana, 2022).

Tahun 2020 menjadi tahun dimana pandemi melanda. Sebagai dampaknya, pemerintah melarang masyarakat untuk berkumpul dan melakukan aktivitas di luar rumah. Hal ini menyebabkan berkurangnya waktu yang dihabiskan di tempat kerja, pemulangan paksa para pekerja, buruh, dan buruh pabrik, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pengangguran (Ryansyah, 2021).

Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten. Hal tersebut tidak terlepas dari masalah yang sedang dihadapi, yaitu masalah sosial dan ekonomi. Salah satu efek dari masalah sosial ekonomi yang terjadi salah satunya adalah meningkatnya pengangguran. Meningkatnya pengangguran disebabkan karena meningkatnya angkatan kerja, akan tetapi kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia (Nureholis, 2014).

Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran sebesar 9,28%; pada tahun 2018 dan 2019 turun sebesar 8,47% menjadi 8,11%; pada tahun 2020, tingkat pengangguran naik sebesar 10,64%. Merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, yang terpaksa membuat banyak perusahaan memotong jam kerja karyawannya dan bahkan menutup usahanya karena sepi pelanggan, menjadi salah satu penyebab kenaikan angka pengangguran di tahun 2020. Hal ini disebabkan peraturan dari pemerintah saat berlakunya PSBB, yang mengharuskan masyarakat mengurangi kegiatan diluar rumah. Oleh sebab itu, perusahaan terpaksa melakukan (PHK) terhadap karyawannya (Ryansyah, 2021).

Pengangguran disebabkan ketika angkatan kerja tumbuh lebih cepat daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Salah satu indikator paling penting di sektor ketenagakerjaan adalah pengangguran, yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik angkatan kerja diserap oleh posisi yang tersedia. Pengangguran yang tinggi berpotensi memberikan dampak yang signifikan terhadap kemiskinan, meningkatkan kriminalitas, dan menghambat pembangunan jangka panjang (Purba, 2022). Gambar 1.4 menggambarkan tingkat pengangguran yang tinggi di Provinsi Banten sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Tahun 2017-2021 (Persen)

Data pada Gambar 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Provinsi Banten berfluktuasi setiap tahunnya. Tingginya pengangguran pada tahun 2020 sebesar 10,64% atau sebanyak 661 ribu orang, yang berarti meningkat sebanyak 2,53% atau bertambah sebanyak 171 ribu orang dibandingkan pada tahun 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,55 juta orang, turun sebanyak 282 orang dari tahun 2019. Sementara itu, sebanyak 2,73 juta orang atau 49,17% bekerja pada kegiatan informal selama setahun terakhir. Sementara itu persentase pekerja pada sektor formal turun sebesar 7,04%, persentase setengah menganggur sebesar 5,01%, dan pekerja paruh waktu naik sebesar 4,44%. Selain itu, terdapat 1,84 juta orang terdampak Covid-19 atau sebesar 19,18%. Akibatnya pengangguran karena Covid-19 sebesar 205 ribu orang, penduduk tidak bekerja sebesar 103 ribu orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja sebesar 1,51 juta orang (BPS, 2022).

Menurut Nuraini, (2017), tingkat pengangguran akan terdampak jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat berkembang dengan baik. Dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan pengangguran yang lebih tinggi jika tidak didukung oleh adanya peluang perusahaan, kesempatan kerja, dan tingkat keterampilan yang rendah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya. Penduduk adalah jumlah total individu atau penduduk di suatu wilayah tertentu pada suatu titik waktu tertentu. Hal ini berdampak pada tingkat pengangguran karena menurut (Muminin, 2017), seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka bertambah pula jumlah pekerja dan angkatan kerja. Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan jumlah penduduk Provinsi Banten:

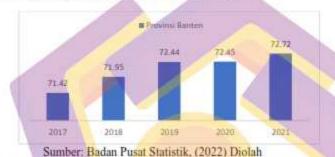


Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Gambar 1.1 Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi Banten mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2019 sebanyak 12.927.316 jiwa, namun pada tahun 2020 turun menjadi 11.904.562 jiwa, penyebab turunnya jumlah penduduk tersebut adalah banyaknya pekerja migran yang diberhentikan akibat covid-19. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten pada tahun 2019 sebesar 1.338 jiwa dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga sebanyak 4 orang. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan ekonomi dapat menurunkan kesejahteraan penduduk suatu daerah. Dampak dari jumlah penduduk yang tinggi antara lain tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan masalah sosial ekonomi lainnya. Oleh karena itu, jika peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi

dengan lapangan pekerjaan, maka akan menyebabkan peningkatan pengangguran (Azizah, 2016).

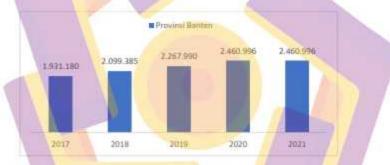
Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa baik keadaan masyarakat di suatu daerah salah satunya adalah indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah indikator yang digunakan untuk menilai berbagai aspek terkait hasil pembangunan ekonomi, khususnya tingkat pembangunan manusia (Hasanah, 2022). Berikut jumlah indeks pembangunan manusia di Provinsi Banten:



Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten tahun 2017-2021

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa IPM Provinsi Banten mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2021. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Meningkatkan IPM untuk mencapai tujuan pembangunan merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah dalam hal ini (Ristika, 2021).

Mengenai pembangunan yang stabil, IPM memiliki tiga komponen utama: pengetahuan, kapasitas untuk mencapai kualitas hidup yang layak, dan terpenuhinya kebutuhan untuk hidup yang panjang dan sehat. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan mata pencaharian, kesehatan, dan pengetahuan berdampak pada hasil dan kualifikasi kerja. Sehingga, beberapa negara berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan cara meningkatkan IPM (Soekapdjo,2021). Menurut Al-Habees (didalam Aziz, 2022) menyatakan bahwa terdapat indikator lain yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran di suatu wilayah adalah upah minimum. Upah minimum yang tinggi dapat membebani perusahaan dan membuatnya kurang kompetitif, sementara upah yang tinggi akan membuat kondisi bisnis menjadi tidak menguntungkan. Agar dapat bertahan, perusahaan harus memutuskan apakah akan melakukan pengurangan tenaga kerja melalui PHK atau pindah ke daerah yang memiliki upah yang lebih rendah. Namun, harus dipastikan bahwa gaji harus sesuai dengan biaya hidup layak, karena hak-hak pekerja tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, peraturan upah minimum pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan perusahaan dan pekerja. Berikut Jumlah Upah Minimum di Provinsi Banten:



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2022) Diolah Gambar 1, 4 Upah Minimum di Provinsi Banten Tahun 2017-2021

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi Banten terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatkan upah minimum dapat meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi angkatan kerja dan meningkatkan permintaan akan produk dan jasa. Meningkatnya upah minimum mendorong para pekerja untuk menafkahi keluarga mereka sehingga mereka dapat hidup dengan layak, sehingga upah minimum juga menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Jumlah tenaga kerja akan meningkat sebagai dampak dari kenaikan upah minimum yang ditetapkan pemerintah namun, ketika perusahaan tidak mampu membayar upah yang

tinggi, permintaan tenaga kerja menurun dan lebih sedikit pekerja yang dipekerjakan. Akibatnya, pemerintah menetapkan kebijakan upah yang diikuti di berbagai daerah. Pemerintah melihat masalah ini untuk memutuskan apakah akan menaikkan upah minimum sekaligus menghindari menambah tingkat pengangguran yang sudah tinggi. Kenaikan upah minimum ditetapkan sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi nasional, walaupun upah minimum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi belum mencukupi biaya dalam memenuhi kebututuha sehari-hari (Pratiwi, 2021).

Apabila seseorang menginginkan pekerjaan tetapi tidak pernah mendapatkannya, mereka dikatakan menganggur. Hal ini dapat terjadi jika ada lebih banyak tenaga kerja yang tersedia daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Pengangguran terbuka adalah keadaan di mana seseorang sedang mencari pekerjaan, terdaftar sebagai pengangguran, belum mulai bekerja tetapi sudah memperoleh pekerjaan, dan bersiap-siap untuk memulai bisnis tetapi tidak memiliki tempat kerja (Yuniarti, 2022). Tingginya angka pengangguran akan menjadi penghambat dalam proses pembangunan dan pertumbuhan, dikarenakan berkurangnya pendapatan dan rendahnya produktivitas masyarakat pada desa tersebut. Oleh sebab itu, Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul: "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten".

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini adanya peningkatan pengangguran di Provinsi Banten yang terjadi di tahun 2020 sebesar 10,64%. Tingginya tingkat pengangguran pada tahun 2020 dikarenakan pekerja beralih ke sektor informal yang menyebabkan sektor formal menurun. Selain itu, setengah menganggur dan pekerja paruh waktu mengalami kenaikan. Serta sebesar 103 ribu orang yang tidak bekerja dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena dampak Covid-19. Sedangkan jumlah penduduk mengalami penurunan, IPM dan upah minimum mengalami peningkatan. Kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain, jumlah penduduk, IPM, dan upah minimum. berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
- Bagaimana pengaruh IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
- 3. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
- Bagaimana jumlah penduduk, IPM, dan upah minimum berpengaruh secara bersamaan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- Untuk menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
- Untuk menganalisis bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
- Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan, pengetahuan serta sebagai pelaksanaan kegiatan akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta Fakultas Ekonomi dan Sosial.

b. Bagi Pemerintah

Melalui kegiatan penelitian ini, peneliti ini diharapkan dapat membantu pemerintah baik daerah setempat maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat guna mengatasi pengangguran daerah setempat secara nasional.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika bab menjelaskan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi garis besar penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir sistematika penulisan bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan dalam menyusun penelitian, penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan gambaran hasil dari penelitian dan analisa serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terkait kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.

